

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERADILAN PIDANA ANAK PELAKU
PEMBUNUHAN (*Studi Putusan Nomor: 12.Pid.Sus. Anak /2015/ Pn.Sgm.*)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

MULTASYAM SALMAH
NIM: 10300113189

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERSEMBAHAN

Karya Kecilku Ini Aku Persembahkan Teruntuk:

*Almarhum bapakku yang mendewasakan aku hingga dewasa
dan ibuku yang telah melahirkan aku ke dunia ini:*

*Saudara-saudaraku yang sangat aku cintai dan mencintaiku
dengan memberi perhatian, dukungan, semangat dalam
menyelesaikan tugas akhir ini, dan mereka juga selalu
mengingatkan untuk selalu berdoa, berusaha dan terpenting
jangan pernah lupa dengan yang menciptakan kita.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Multasyam Salmah

Nim : 10300113189

Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang/07 April 1995

Jur/Prodi/Konsentrasi : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Fakultas/Program : Syari'ah dan Hukum

Alamat : Btn Ranggong Permai Blok A14/7 Antang Kassi Makassar

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Peradilan Pidana Anak Pelaku
Pembunuhan (*Putusan Nomor: 12.Pid.Sus. Anak /2015/
PN.Sgm.*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 31 juli 2017

Penyusun



Multasyam salmah
10300113189

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul, “Analisis Yuridis Terhadap Peradilan Pidana Anak Pelaku Pembunuhan (*Studi Putusan Nomor : 12 Pid. Sus. Anak/2015/ Pn. Sgm.*)”, yang disusun oleh Multasyam Salmah, NIM: 10300113189, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 M, bertepatan dengan 17 Dzul-Qa’idah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pidana Islam, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan dengan beberapa perbaikan.

Makassar, 13 Agustus 2017 M.
17 Dzul-Qa’idah 1438 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof.Dr.Darussalam,M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dra.Nila Satrawati M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Dr.Dudung Abdullah, M.Ag	(.....)
Munaqisy II	: Abdul Rahman Kanang, M.Pd.,P.hD	(.....)
Pembimbing I	: Dr. M. Thahir Maloko., M.Hi	(.....)
Pembimbing II	: Dr. H. M. Saleh Ridwan., M.Ag	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT seru sekalian alam, karena atas rahmatnya dan ridho-NYA, maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Peradilan Pidana Anak Pelaku Pembunuhan (*Stud iPutusan Nomor: 12.Pid.Sus. Anak /2015/ Pn.Sgm.*)” sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana strata satu (S1) program Studi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Makassar. Serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan beserta sahabatnya.

Merangkai kata menjadi kalimat, kemudian membahas dan menyatukan menjadi suatu karya ilmiah merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk secepatnya diselesaikan karena diperlukan pemikiran, dan konsentrasi penuh untuk dapat mewujudkannya.

Penulisan skripsi ini bukan merupakan hasil tunggal, melainkan tidak terlepas dari pemikiran dan budi baik banyak orang, dengan kesungguhan hati saya ucapkan terimah kasih kepada kedua orang tua yang senantiasa saya hormati, almarhum Ayahanda H.Abd. Salam dan Ibunda H.J Mahadiah yang sangat saya cintai dan banggakan. Terimah kasih banyak atas segala kasih sayang dan cinta tanpa batas yang telah kalian berikan kepada penulis. Apa yang penulis berikan saat ini hanyalah segelintir ucapan terimah kasih dan kasih sayang yang tidak dapat terbendung lagi. dan sesungguhnya penulis tidak akan pernah mampu untuk membalas kasih sayang yang telah ayah dan ibu berikan.

untuk saudaraku yang telah seperti orang tua kedua saya sendiri Bapak Saenong dan Ibu Subaena yang tak henti-hentinya mengasihi dan menyayangi saya seperti anaknya sendiri, yang telah banyak memberi dukungan baik itu dukungan moril maupun materil, sekali lagi saya ucapkan terimah kasih untuk semua yang telah kaka berikan kepada saya. Beserta saudara-saudaraku Nurdiansyah, Hasmah Salmah, Sri Radia Ningsih Salmah, Sarmilah Salmah, dan Nurhaimin salmah yang selalu menjadi motivasi untuk menjadi adik yang baik dan sekaligus menjadi kaka yang bisa menjadi panutan untuk kalian. Dengan penuh kasih sayang, serta ketulusan hati tanpa pamrih memberikan bantuan moril dan materil serta doa yang tulus demi kesuksesan saya selama pelaksanaan proses kuliah dan penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan oleh sebab itu melalui kesempatan ini Penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, para wakil Rektor, dan seluruh Staf UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan maksimal
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dan Pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini
3. Ibu Dra. Nila Sastawati selaku Ketua Jurusan dan Ibunda Dr. Kurniati, M.Hi, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
4. Bapak Dr. M. Thahir Maloko., M. Hi selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak kontribusi ilmu dan berbagai masukan- masukan yang membangun terkait judul yang diangkat. Dan Bapak Dr. H. M. Saleh Ridwan,

pembimbing II yang telah memberikan banyak pengetahuan terkait metode penelitian dalam skripsi ini.

5. Dr. Dudung Abdullah, M. Ag selaku penguji I dan Abd. Rahman Kanang, M. Pd., Ph.D selaku penguji II yang senantiasa memberi masukan dan kontribusi ilmu dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Hakim- Hakim serta staf Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang selalu menyempatkan waktu selama penelitian berlangsung.
7. Teman- teman terkasih Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 2013, terima kasih banyak atas kebersamaanya selama ini.
8. Teman-teman dan sahabat seperjuanganku Kurcaci, (Sutriani, Nurjannah, Rini Alfiani Syamrah, dan Susianti) terima kasih atas dukungannya.
9. Temanku Ismail S.H yang telah menjadi pembimbing III bagi saya, terima kasih banyak atas bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Serta terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang selama ini membantu dan mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam penulisan skripsi ini tidaklah mungkin menjadi sempurna. Dengan mengingat setiap kekurangan yang ada. Namun penulis mengerti bahwa hasil penelitian ini masih perlu untuk disempurnakan lagi. Mohon para pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Penulis



Multasyam salmah

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya		Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda /	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ /	<i>fathah dan yaa'</i>	Ai	a dan i
أُ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... أْ...	Fathah dan alif atau yaa'	A	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan yaa'	I	i dan garis di atas
أُ	Dhammah dan waw	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *maata*

رَمَى : *ramaa*

قِيلَ : *qiila*

يَمُوتُ : *yamuutu*

4. Taa' marbuutah

Transliterasi untuk *taa'marbuutah* ada dua, yaitu *taa'marbuutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *taa' marbuutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *taa' marbuutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *taa' marbuutah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

الْأَطْفَالِ الرَّوَضَةِ : *raudah al- atfal*

الْقَاضِيَةُ الْمَدِينَةُ : *al- madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (َ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang anda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanaa*

نَجَّيْنَا : *najjainaa*

الْحَقُّ : *al- haqq*

نُعَمَّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*بي*) maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh :

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruuna*

النَّوْغُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'an*), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fizilaal Al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al- Jalaalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ *diinullah* بِاللَّهِ *billaah*

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalaalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh :

hum fi rahmatillaah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).
contoh:

Wa ma muhammadun illaa rasul

Inna awwala baitin wudi' alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan

Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur'a

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.
Contoh:

Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	= <i>subhanallahu wata'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
r.a	= <i>radiallahu 'anhu</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
QS.../...4	= QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1-9
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	10-41
A. Anak	10
1. Pengertian Anak Nakal.....	10
2. Batas Usia Anak.....	11
a. Batas Usia Anak Berdasarkan Undang-Undang	11
b. Batas Usia Anak Berdasarkan Hukum Pidana Islam	13
B. Perlindungan Terhadap Anak	16
C. Peradilan Pidana Anak.....	21
1. Penyidikan	21
2. Penangkapan dan Penahanan	23
3. Penuntutan	25

4. Pemeriksaan di Pengadilan	26
5. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.....	28
D. Pemidanaan Bagi Anak Nakal	32
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan	36
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	36
2. Tinjauan Hukum Islam Tindak Pidana Pembunuhan.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	42-45
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Sumber Data.....	42
D. Metode Pengumpulan Data	43
E. Instrumen Penelitian.....	44
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46-68
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan Dalam Proses Persidangan Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	45
B. Analisis Hukum Islam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur.....	59
BAB V PENUTUP.....	69-73
A. Kesimpulan.....	69
B. Implikasi Penelitian	70
DAFTAR PUSTAKA	71-73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : Multasyam Salmah
Nim : 10300113189
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Peradilan Pidana Anak Pelaku Pembunuhan (*Studi Putusan Nomor : 12 Pid. Sus. Anak/2015/ Pn. Sgm.*)

Pokok masalah ini adalah bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Peradilan Pidana Anak Pelaku Pembunuhan (*Studi Putusan Nomor : 12 Pid. Sus. Anak/2015/ Pn. Sgm.*), selanjutnya sub masalah yaitu: 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan dalam proses peradilan pidana anak menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak, 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris, penelitian dilakukan di Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, tepatnya di Pengadilan Negeri Sungguminasa Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis, syar'i dan sosiologis. Sumber data di peroleh dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Selain itu analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jawaban atas permasalahan yang ada dan menarik kesimpulan: 1) Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana anak pelaku pembunuhan pada *Putusan Nomor: 12.Pid.Sus. Anak /2015/ PN.Sgm.* yaitu anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak, waktu sidang didahulukan dari waktu sidang orang dewasa, hakim tidak memakai toga/panitera tidak memakai jas (tidak menggunakan baju kebesaran), persidangan tertutup untuk umum dan beracara cepat, sanksi $\frac{1}{2}$ dari sanksi orang dewasa, dan wajib diadili oleh hakim tunggal. Sebagaimana dimuat dalam pasal 44 (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak apabila ancaman pidananya di atas 7 maka perkara tersebut diadili oleh majelis hakim dan apabila ancaman pidananya 7 tahun ke bawah wajib diadili oleh hakim tunggal ; 2) Dalam hukum Islam apabila seseorang melakukan pembunuhan, maka orang tersebut dapat dikenakan *al-qi ā* , tetapi karena pelaku masih kategori anak yang mempunyai kemampuan berfikir lemah maka hukumannya dapat ditangguhkan sampai dia dewasa berdasarkan *Ma hab* syafi'iyah, Hanabilah dan Hanafiyah, sedangkan *Ma hab* malikiyah tidak perlu di *al-qi ā* tetapi cukup membayar *al-diyat* kamilah oleh wali sebagai hukuman pengganti dari *al-qi ā* . Dalam hal ini pemerintah (hakim) berhak dalam menetapkan hukum dengan memilih salah satu dari beberapa *Ma hab* tersebut atau tidak sama sekali ataupun menggantinya dengan *al-ta'zir* (hukuman yang tidak ada dalam *nash*).

Adapun implikasi dalam penelitian ini yaitu: Diharapka untuk para penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum yang paripurna sesuai dengan tujuan hukum acara peradilan pidana anak, sehingga hak-hak setiap warga Negara khususnya anak di bawah umur dapat terlindungi. Sebaiknya dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak, hakim sebagai pembuat keputusan diharapkan lebih berhati-hati dalam menetapkan hakim tunggal dan majelis hakim untuk mengadili perkara anak dipersidangan serta memperhatikan setiap aturan yang telah ditetapkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.¹

Anak sebagai aset bangsa merupakan seseorang yang harus memperoleh hak-hak tertentu untuk menjamin pertumbuhan dan pengembangan baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Dengan kata lain, anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Dengan adanya jaminan dari UUD NRI 1945 tersebut bahwa anak dianggap belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik itu secara rohani maupun jasmani.²

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya. Baik itu anak sebagai korban maupun sebagai tersangka di mata hukum semuanya sama-sama mempunyai hak untuk dilindungi.

¹Republika Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014*, h. 2

²Inur Hidayati, *UUD 1945 dan Perubahannya+ Struktur Ketatanegaraan* (Cet. VII; Yogyakarta: Indonesia Tera, 2008), h.39.

Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibanya. Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, disebutkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Tujuan mendasar dari perlindungan anak untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawal perlindungan anak, mengenali tugas-tugasnya dan dapat memenuhi tugas itu. Secara etika dan hukum harus ada, perlindungan anak merupakan setiap orang disetiap tingkatan masyarakat dan disetiap bidang tugas. Perlindungan anak menciptakan kewajiban/ tugas bagi presiden, perdana menteri, hakim, orang tua, bahkan anak-anak sendiri dan penegak hukum lainnya.

Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif pesatnya perkembangan antara lain terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dan berteknologi, terbuka informasi yang diperoleh melalui satelit dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Dampak negatifnya antaranya yaitu semakin

³Republika Indonesia, *Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014*, h. 2.

meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk.

Pelaku kejahatan makin beragam tingkat sosial dan usianya. Akan tetapi yang menjadi keprihatinan akhir-akhir ini adalah kenyataan bahwa jumlah pelaku kejahatan anak di berbagai daerah menunjukkan peningkatan. Komisi perlindungan anak menyebutkan bahwa setiap tahun tak kurang dari 6000 anak berkonflik dengan hukum. Di kabupaten Gowa khususnya menurut data yang ada, khusus kekerasan pada anak belakangan ini semakin marak terjadi. Dari 2013-2014itunaiknya 100%, baik itu yang jadi korban ataupun pelaku.⁴

Kondisi penanganan anak yang melakukan tindak pidana amat memperhatinkan. Dilihat banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum. Disamping itu dalam praktek kerap juga terjadi pelanggaran ketika aparat hukum memproses perkara anak, baik saat pemeriksaan, penyidikan maupun persidangan. Yang berpotensi menimbulkan intimidasi secara langsung dan tidak langsung (mental) maupun fisik. Hal ini berdampak terhadap psikologis anak yang membuat frustrasi dalam menatap masa depannya.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga. Untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani

⁴Badan Pusat Statistik Perlindungan Anak Kabupaten Gowa, 2015. Sumber: <http://perlindungananak.com/data/anak-berhadapan-hukum-di-kab-gowa> (november 2016).

sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁵

Anak yang melakukan tindak pidana tidak terlepas dari pertanggung jawaban hukum positif terhadap perbuatan yang dilakukannya, sehingga timbul tugas yang mulia bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai dan tepat bagi anak sebagai tersangka dalam persidangan mengingat anak itu masih memiliki masa depan yang panjang. Anak sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya tentu belum memahami apa yang baik dan buruk untuk dilakukan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang dalam kenyataan hakim dalam menjatuhkan putusan kadang-kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan bagi diri si pelaku, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa, dalam konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak

⁵Wagianto Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Cet.II; Bandung: PT Rafika Aditama, 2008), h. 29.

Perlindungan anak berkaitan erat dengan keadilan, karena dalam peradilan pidana anak, rasa keadilan para penegak hukum yang menangani anak nakal mempengaruhi tindakan-tindakannya. Apabila keadilan dihubungkan dengan perlindungan anak, maka dalam keadilan tercermin perlindungan anak yang baik ataupun perlindungan anak yang baik mencerminkan keadilan yang implementasinya adalah hak-hak anak.

Oleh karena itu dalam pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana haruslah diperhatikan tentang tujuan peradilan anak yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal setelah melewati masa –masa sulit ketika berhadapan dengan hukum.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Peradilan Pidana Anak Pelaku Pembunuhan (Putusan Nomor:12.Pid.Sus. Anak /2015/ PN.Sgm.)”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan ini yaitu: Analisis Yuridis Terhadap Peradilan Pidana Anak Pelaku Pembunuhan (Putusan Nomor: 12.Pid.Sus. Anak /2015/ PN.Sgm.)? Maka yang menjadi sub masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan pada Putusan Nomor: 12.Pid.Sus. Anak /2015/ PN.Sgm menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak?
2. Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap tindak pidana pembunuhan oleh anak dibawah umur?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Secara umum, dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan undang-undang tentang perlindungan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan, yang dimana dalam hal ini anak yang menjadi tersangka dalam persidangan PN Sungguminasa. Karena seperti kerap kita jumpai ketika anak yang berhadapan dengan hukum terkadang tidak diberi perlindungan sesuai dengan undang-undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem peradilan anak.

Secara khusus, fokus penelitian pada penelitian ini dapat diketahui melalui tabel berikut, yaitu:

No.	Fokus penelitian	Deskripsi fokus
1.	Bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan.	Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengadilan dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak sebagai pelaku pembunuhan dalam proses peradilan.
2.	Analisis hukum Islam terhadap anak pelaku pembunuhan	Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana posisi atau kedudukan anak di mata hukum dalam hukum Islam yang dimana seorang anak yang melakukan pembunuhan.

Tabel 1. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

D. Kajian Pustaka

Dalam skripsi ini penulis menggunakan literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud, diantaranya adalah sebagai berikut :

Marlina dalam bukunya *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* buku ini menjelaskan tentang berbagai permasalahan terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum, peradilan pidana anak dan peradilan pidana anak di Indonesia, dengan menawarkan konsep diversi dan Restorative justice. Namun dalam buku ini tidak menjelaskan secara spesifik mengenai anak pelaku pembunuhan dalam proses peradilan, melainkan berfokus pada permasalahan penyelesaian kasus anak diluar pengadilan.

Wagiati Soetodjo dalam bukunya *Hukum Pidana Anak* buku ini menjelaskan tentang gejala dan timbulnya kenakalan anak serta prosedur pemeriksaan serta batas pemidanaan anak hingga hak-hak anak atas perlindungan hukum. Namun dalam buku ini tidak dijelaskan mengenai perlindungan anak yang menjadi tersangka dalam sebuah peradilan.

Bagong Suyanto dalam bukunya *Masalah Sosial Anak* buku ini secara garis besar menjelaskan gambaran umum tentang anak mulai dari pengertian anak rawan, dampak krisis terhadap perkembangan anak rawan, jenis dan kondisi yang melatarbelakangi perkembangan anak krawan, besaran masalah anak rawan didunia dan di Indonesia dan dampak tindak kekerasan terhadap anak-anak yang menjadi korban dalam kekerasan seksual. Namun dalam buku ini tidak dijelaskan secara terperinci tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan.

Abdussalam dalam bukunya *Hukum Perlindungan Anak* dalam buku ini menjelaskan secara garis besar mengenai apa itu perlindungan anak, baik

perlindungan terhadap anak dalam keadaan terpuruk maupun dalam keadaan sengketa bersenjata, penegakan hukum terhadap anak-anak nakal baik dalam penangkapan, penahanan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan petugas kemasyarakatan. Namun lagi-lagi dalam buku ini tidak dijelaskan secara spesifik perlindungan terhadap anak pelaku pembunuhan dalam hukum Islam melainkan cuman berfokus pada hukum positif, baik kiranya jika dalam buku ini di jelaskan secara umum mengenai penerapan sanksi anak sebagai pelaku pembunuhan dalam hukum islam.

R Wiyono dalam bukunya *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* dalam buku ini menjelaskan berupa analisis yuridis dari ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 meliputi pengertian, sistem peradilan pidana anak, instrument internasional tentang perlindungan hukum anak, keadilan restorative, diversi, hukum acara peradilan anak, ketentuan pidana, dan sanksi.

Dari beberapa literatur diatas tidak ada yang menjelaskan secara kongkrit tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak dalam hukum Islam, baik kiranya di kemudian hari ada buku yang menjelaskan secara terperinci bagaimana pengaturan hukum mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh anak baik itu hukum positif maupun hukum Islam.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan dalam proses peradilan pidana anak menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak.

- b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap tindak pidana pembunuhan oleh anak dibawah umur

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan ilmu hukum, Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dalam hal ini perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pidana khususnya perlindungan hukum terhadap anak.
- 2) Sebagai referensi tambahan bagi para akademis, penulis, dan sebagai bahan masukan bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penyempurna dengan mengadakan penelitian yang serupa.

b. Kegunaan praktis

- 1) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan tambahan sumber informasi terhadap pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada proses persidangan.
- 2) Bagi aparat penegak hukum, dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga terkait, terutama bagi aparat penegak hukum (hakim) dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pada proses persidangan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Anak

1. Pengertian Anak Nakal

Kenakalan anak diambil dari istilah asing *juvenile Delinquency*,. Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ilmuwan tentang *Juvenile Delinquency* ini, seperti uraian dibawah ini:

Paul Moedikno (dalam Romli Atmasasmita, 1983:22) memberikan perumusan mengenai pengertian *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut:

- a. Semua perbuatan dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan bagi anak-anak merupakan *delinquency*, jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya pemakaian celana jangki tidak sopan, mode *you can sea* dan sebagainya.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi social, termasuk gelandangan , pengemis dan lain-lain.⁶

Menurut Anthony M. Platt definisi *delinquency* adalah perbuatan anak yang meliputi (1) perbuatan tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa, (2) perbuatan yang melanggar atauran Negara atau masyarakat, (3) perilaku tidak bermoral yang ganas, pembolosan, perkataan kasar dan tidak senonoh, tumbuh dijalanan dan

⁶Wagianto Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Cet.II ; Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h. 9.

pergaulan dengan orang yang tidak baik yang memungkinkan pengaruh buruk bagi anak di masa depan.⁷

Berdasarkan beberapa definisi kenakalan anak (delinquency) dapat disimpulkan, delinquency adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat atau norma-norma hukum atau aturan tertentu yang berlaku di dalam kelompok masyarakat atau Negara di mana anak tersebut bertempat tinggal yang bersifat anti social atau melawan hukum.

2. Batas Usia Anak

a. Batas Usia Anak Berdasarkan Undang-Undang

Pengelompokan pengertian anak memiliki aspek yang sangat luas, sejumlah undang-undang yang mengatur status dan perlakuan terhadap anak memiliki perbedaan mengenai batasan atau definisi usia yang dikategorikan sebagai anak. Pada tahun 1990 dalam konvensi tentang hak-hak anak mendeskripsikan “anak” seperti yang tercakup dalam pasal 1 konvensi tersebut yaitu: Setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia anak dicapai lebih awal.

- 1) Pasal 330 ayat (1) KHUPerdata (BW) mendefinisikan batas umur anak antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarighed*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (*venia aetatis*, pasal 419 KUHper).⁸ sedangkan pasal 45 KHUPidana mengatakan anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun .

⁷Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Cet.1 ; Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 37.

⁸Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Cet.III; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 3-4.

2) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 Ayat (5)

“Anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan”.

3) UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 Angka 2

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin”.

4) Menurut UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 butir 1

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan”.

5) Menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 3

“Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Mengetahui batasan umur anak-anak, terjadi keberagaman diberbagai Negara yang mengatur tentang usia anak. Di negara Inggris batas usia anak yang dapat dihukum bila telah mencapai usia 8 tahun, di Denmark 15 tahun yang berarti diatas umur tersebut relatif dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya seperti orang dewasa yang mendapat putusan berupa tindakan maupun pidana yang bersifat

khusus.⁹ Berdasarkan berbagai pengertian anak, maka untuk menentukan batas-batas usia secara cepat dan sulit, sebab perkembangan seseorang baik fisik maupun psikis berbeda satu sama lainnya. Terkadang seseorang sudah mencapai usia dewasa, namun tingkah lakunya masih memperlihatkan tanda-tanda belum dewasa demikian pula sebaliknya.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa dalam sistem hukum Indonesia tidak terdapat keseragaman untuk menentukan batas kedewasaan seseorang. mengenai pengertian anak yang belum dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan beberapa pendapat para ahli hukum, yang dimana diketahui bahwa batasan umur anak sangat penting dalam perkara pidana baik anak selaku korban maupun selaku pelaku tindak pidana, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga sebagai korban maupun pelaku termasuk kategori anak atau bukan.

Yang dimaksud anak dalam tulisan ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana Menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 3

b. Batas Usia Anak Menurut Hukum Pidana Islam.

Defenisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan defenisi hukum Islam, menurut hukum Islam menentukan seseorang masih anak-anak atau

⁹Wagianto Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, h. 26.

sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum, artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa berdasarkan hukum Islam.¹⁰ Dalam hal ini batasan usia anak tidak berdasarkan atas hitungan usia tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik pria maupun wanita. Berdasarkan hal tersebut anak telah dikatakan *baliqh* (dewasa), batas *baliqh* juga telah sudah ditentukan secara pasti, yaitu anak laki-laki apabila sudah bermimpi basah dan wanita apabila sudah haid. Dalam istilah ilmiahnya sudah matang secara biologis bukan matang secara fisik.

Menurut kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat (1), “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”¹¹

Kemudian menurut imam syafi'i sebagaimana yang telah dikutip oleh Chairuman dan Suhrawandi dalam bukunya hukum perjanjian dan hukum Islam, seorang anak dikatakan dewasa apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah *ikhtilam* atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.¹²

¹⁰Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, h. 32.

¹¹Republika Indonesia, *Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam* (cet.1;t:t: Permata Press, t.th.), h. 53.

¹²Chairuman Suhrawandi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 10.

Seorang anak laki-laki yang mimpi bersetubuh mengeluarkan air mani walaupun belum berusia 15 tahun sudah dianggap dewasa adalah disebabkan ketentuan hukum sebagaimana dikatakan dalam QS An-Nur/24: 59.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ۚ أَسْتَأْذِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٩)

Terjemahnya :

Dan apabila anak-anakmu Telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹³

Dalam fiqih kata balig (dewasa) seseorang dapat dilihat dari beberapa tanda yaitu: cukup berumur 15 tahun, keluar mani, mimpi besetubuh, mulai keluar haid bagi perempuan. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

“Yang terlepas dari hukum ada tiga macam; 1) kanak-kanak hingga ia dewasa, 2) orang tidur hingga ia bangun, 3) orang gila hingga ia sembuh.” (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).¹⁴

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan terkhusus QS An-Nur/24: 59, terdapat kalimat “Dan apabila anak-anakmu Telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin” Dari kalimat tersebut dapat dipahami bahwa anak merupakan seseorang yang belum dapat dibebani hukum karena belum mencapai umur balig. seseorang dianggap balig apabila cukup berumur 15 tahun, keluar mani, mimpi bersetubuh dan keluarnya haid bagi perempuan.

¹³Kementrian Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2002), h. 499.

¹⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)* (Cet. 27; Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994), h. 65-66.

Perkembangan aspek jasmani merupakan dasar dalam perkembangan mental, maksudnya perkembangan mental hanya dapat berjalan dengan baik, apabila perkembangan fisik juga baik.¹⁵

Dari aspek agama (Islam) jelas bahwa tidak ada kriteria baku yang menjelaskan dan memberi batasan tentang pengertian anak, hanya atas dasar pertumbuhan jasmani atau keadaan biologis.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak itu sendiri adalah segala usaha untuk menciptakan kondisi agar setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar dan fisik, mental, dan sosial.¹⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (2) bahwa: “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹⁷

Menurut Arif Gosita bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum yang tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin hak anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dan juga hukum yang menjadi dasar dan

¹⁵Munir, *Implementasi Hadis Pendidikan Shalat Terhadap Anak Pada Masyarakat di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar* (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 122.

¹⁶Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak & Remaja* (Cet.I; Bandung: Ghalia Indonesia, 2015), h. 14.

¹⁷Republika Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014*, h. 5.

pedoman melindungi, mengatur dan menjamin anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi positif.¹⁸

Adapun Menurut *Anthony M. Platt* prinsip dari perlindungan terhadap anak adalah:

1. Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat dewasa.
2. Anak nakal harus dijatuhkan dari lingkungannya yang kurang baik dan diberi perlindungan yang baik. Anak harus dijaga dengan paduan cinta dan bimbingan.
3. Perbuatan anak nakal harus diupayakan untuk tidak dihukum, walaupun dihukum harus dengan ancaman hukuman yang minimal dan bahkan penyidikan tidak diperlukan karena terhadap anak harus diperbaiki bukan dihukum.
4. Terhadap anak nakal tidak ditentukan hukuman baginya, karena menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang hukuman.
5. Hukuman terhadap anak hanya dijalankan jika tidak ada lagi cara lain yang lebih baik dijalankan.
6. Penjara terhadap anak dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik yang buruk.
7. Program perbaikan yang dilakukan lebih bersifat keagamaan, pendidikan, pekerjaan, tidak melebihi pendidikan pendidikan dasar.

¹⁸Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Cet. 1; Yogyakarta: Laskbang Pressindo, 2016), h. 12.

8. Terhadap narapidana anak diberi pengajaran yang lebih baik menguntungkan dan terarah pada keadaan dunia luar.¹⁹

Kebutuhan akan perlindungan anak juga diatur dalam konvensasi tentang hak-hak anak (*convention on the rights of the child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990. Hak-hak yang wajib diberikan perlindungan oleh Negara ketika anak berhadapan dengan hukum yaitu:

1. Anak tidak dapat dijadikan sasaran penganiyaan, atau perlakuan kejam lain yang tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan.
2. Anak tidak dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaranya sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan sebagai upaya terakhir dalam waktu sesingkat mungkin.
3. Anak yang ditahan harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya dan pemenuhan kebutuhannya.
4. Anak yang ditahan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam keadaan-keadaan luar biasa.
5. Anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk mendapat penjelasan tentang

¹⁹Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, h. 59.

penahanan terhadap dirinya di hadapan suatu pengadilan atau pengusaha lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan mendapatkan keputusan segera terhadap tindakan yang dilakukannya.

6. Anak harus mendapatkan penyembuhan fisik dan psikologis dan integrasi sosial kembali oleh Negara guna mengembalikan martabat anak.
7. Anak tidak boleh dituduh atau disangka melanggar hukum pidana karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan- perbuatan itu dilakukan.
8. Anak yang dituduh melanggar hukum pidana dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum.
9. Anak yang dituduh melanggar hukum pidana harus diberi informasi dengan segera dan langsung tuduhan terhadap dirinya kepada orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya.
10. Proses pemeriksaan dan pengadilan terhadap anak dilakukan tanpa penundaan oleh badan yang berwenang, mandiri dan adil, dihadiri oleh bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, kecuali demi kepentingan anak.
11. Anak tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengaku bersalah; untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan.
12. Setiap orang yang dianggap telah melanggar hukum pidana berhak mengajukan upaya hukum untuk ditinjau kembali keputusan terhadapnya

oleh penguasa lebih tinggi yang berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum.

13. Anak berhak mendapat bantuan seorang penerjemah dengan Cuma-Cuma kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan.
14. Kerahasiaan seorang pelaku anak dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan.²⁰

Adapun yang dimuat dalam pasal 2 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menentukan bahwa asas atau prinsip konvensi hak-hak anak, meliputi:

1. Non diskriminasi, dalam hal ini yang dimaksud dengan non diskriminasi adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak-hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak, dalam hal ini yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

²⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, h. 46-48.

4. Penghargaan terhadap anak pendapat anak, dalam hal ini yang dimaksud dengan Penghargaan terhadap anak pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.²¹

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya untuk melindungi anak dengan menciptakan aturan-aturan untuk menjamin agar anak dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

C. Peradilan Pidana Anak

1. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan itu dapat meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan alat-alat bukti, penggeledahan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka. Sementara Yahya Harapan mendefinisikan penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana.²²

²¹Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 31-32.

²²Angger Sigit Pramukti & Fuaddy Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Cet. I ;Yogyakarta: Pustaka Yustisia), h. 76.

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh pejabat kepolisian Negara RI bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana, dengan penyidikan juga diajukan untuk menemukan pelakunya.²³ selanjutnya pemeriksaan terhadap anak korban atau saksi dilakukan oleh penyidik tersebut. Dalam hal melakukan penyidikan terhadap syarat yang harus dipenuhi , yaitu: a) Telah berpengalaman sebagai penyidik; b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Yang dimaksud mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak adalah memahami: pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif dan simpatik. Pertumbuhan dan perkembangan anak, berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang memengaruhi kehidupan anak; c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Akan tetapi, dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan diatas, tugas penyidikan dilakukan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini dimaksudkan agar penyidikan tetap dapat dilaksanakan walaupun di daerah yang bersangkutan belum ada petunjuk penyidik. Dalam melakukan penyidikan perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, hasil penelitian kemasyarakatan juga wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima.

²³Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, h. 85.

Pada dasarnya penyidik wajib mengupayakan diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana) dalam waktu paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi. Dalam hal diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Akan tetapi apabila diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.²⁴

2. Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan merupakan suatu tindakan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa dengan menempatkannya pada Rumah Tahanan Negara.

Penangkapan terhadap anak dilakukan demi kepentingan penyidikan paling lama 24 jam. Perhitungan 24 jam masa penyidikan dihitung berdasarkan waktu kerja. Dalam hal ini untuk melindungi kepentingan dan hak asasi manusia.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi:

- 1) Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam;
- 2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak;

²⁴Angger Sigit Pramukti & Fuaddy Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 77.

- 3) Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS;
- 4) Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- 5) Biaya bagi setiap anak yang diteempatan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.²⁵

Penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/ atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/ tak mengulangi tindak pidana. Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, tetapi penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, fisik, mental, maupun social anak dan kepentingan masyarakat.

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat:

- a. Anak telah berumur 14 tahun atau lebih.
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih.

Penahanan yang dilakukan penyidikan dilakukan paling lama 7 hari. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 hari. Apabila jangka waktu belum berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

²⁵Redaksi sinar Grafika, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 2012 (UU RI No. 11 Tahun 2012)*, (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 21-22.

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari dan dalam hal jangka waktu dimaksud telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.²⁶

3. Penuntutan

Penuntutan adalah perlimpahan suatu berkas perkara oleh jaksa penuntut umum kepada pengadilan dengan membuat surat dakwaan.²⁷ Penututan dalam acara pidana anak berarti tindakan penuntut umum anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam sidang persidang anak.

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjukan oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum meliputi:²⁸

- a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

²⁶Angger Sigit Pramukti& Fuaddy Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* , h. 78-79.

²⁷Angger Sigit Pramukti& Fuaddy Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* , h. 80.

²⁸Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 2012 (UU RI No. 11 Tahun 2012)*, h. 26.

Dalam hal belum terdapat penuntut umum yang memenuhi syarat diatas, tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Penuntut Umum Anak wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan diversi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi berhasil mencapai kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara kepengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

4. Pemeriksaan di Pengadilan

Fungsi pemeriksaan perkara di pengadilan (*function of adjudication*) merupakan subfungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim dan penuntut umum, penasehat hukum, serta pejabat pengadilan yang terkait. Melalui fungsi pemeriksaan di pengadilan ini akan ditentukan kesalahan terdakwa (*the determination of equity*) dan penjatuhan hukuman (*the imposition of punishment*).²⁹ Dalam pemeriksaan di pengadilan hakim tingkat pertama, banding maupun kasasi memiliki fungsi masing-masing, adapun yaitu:

a. Hakim Tingkat Pertama

Hakim Pengadilan Anak yaitu terhadap Hakim Tingkat Pertama, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua

²⁹ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana* (Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2016, h. 219).

Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.³⁰ Syarat untuk ditetapkan sebagai Hakim, sebagai berikut: 1).Telah berpengalaman sebagai hakim dlam lingkungan peradilan umum; 2). Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak; 3). Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Apabila belum ada hakim yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan diatas, maka tugas pemeriksaan disidang anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

b. Hakim Banding

Hakim banding memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat banding dengan hakim tunggal. Ketua Pengadilan Tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya serta di dalam menjalankan tugasnya, hakim banding dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

c. Hakim Kasasi

Hakim kasasi ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Hakim kasasi memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat kasasi sebagai hakim tunggal. Ketua Mahkamah Agung menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Didalam menjalankan tugasnya, hakim kasasi dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

³⁰Angger Sigit Pramukti& Fuaddy Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 82.

d. Hakim Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahap proses Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan mengenai perkara anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan Peninjauan Kembali oleh anak, orang tua/wali, dan/atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umu. Sebelumnya, hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 hari. Pada prinsipnya, proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Jika proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.³¹ Dalam hal diversi tidak dilakukan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Dalam pemeriksaan sidang anak, pejabat pemeriksa yaitu hakim, penuntut umum, penasihat hukum tidak memakai toga. Juga panitera yang bertugas membantu hakim tidak memakai jas.³² Dalam hal ini semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai pejabat pemeriksa, dimaksudkan agar dalam persidangan tidak menimbulkan kesan menakutkan atau menyeramkan terhadap anak yang diperiksa.

³¹ Angger Sigit Pramukti & Fuaddy Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 83-84.

³² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, h. 140.

Pada sidang anak, hakim yang memimpin perkara adalah hakim anak, yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui ketua Pengadilan Tinggi. Untuk menjadi hakim anak, harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh UU Sistem Peradilan Pidana Anak (pasal 43 ayat 2) yang berbunyi:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.³³

Pemeriksaan sidang anak pada dasarnya dilakukan dengan hakim tunggal (pasal 44 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak) dengan sidang tertutup.³⁴ Dengan hakim tunggal, bertujuan agar sidang anak diselesaikan dengan cepat. Memang pada prinsipnya bahwa penyelesaian perkara anak dapat dilakukan dengan waktu singkat/ cepat agar anak tidak berlama-lama mendapat perlakuan terkait pemberian sanksi terhadap kenakalan yang telah dilakukannya.

Perkara anak yang disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara-perkara pidana ancaman hukumannya tujuh tahun atau ke bawah dan pembuktiannya mudah dan tidak sulit. Apabila tindak pidanya diancam dengan hukuman penjara di atas tujuh tahun dan pembuktiannya sulit, maka berdasarkan pasal 44 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁵ Perkara tersebut diperiksa dengan hakim majelis.

³³Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 2012 (UU RI No. 11 Tahun 2012)*, h. 28.

³⁴ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 2012 (UU RI No. 11 Tahun 2012)*, h. 26.

³⁵ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 2012 (UU RI No. 11 Tahun 2012)*, h. 29.

Berdasarkan pasal 16 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02. PW. 07. 10 Tahun 1997 tentang tata tertib persidangan dan tata tertib ruang sidang, bahwa ruang sidang pengadilan anak dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. Ruangan untuk tempat hakim, panitera dan rohaniawan;
- b. Ruangan untuk tempat penuntut umum, penasehat hukum, pembimbing masyarakatan, terdakwa, saksi dan orang tua, wali atau orang tua asuhnya;
- c. Ruangan untuk umum.³⁶

Pada saat proses persidangan, anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak. Selanjutnya, ruang sidang tunggu untuk anak dipisahkan dari ruang tunggu orang dewasa. Adapun waktu sidang anak di dahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Dalam sidang anak, hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.³⁷ Pemeriksaan perkara anak harus dilakukan secara tertutup di ruang sidang khusus anak. Walaupun demikian, dalam hal tertentu dipandang perlu, hakim dapat menetapkan pemeriksaan terbuka untuk umum tanpa mengurangi hak anak. Disamping itu, hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Dalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokat, pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Apabila orang tua/wali/pendamping tidak hadir sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau pembimbing kemasyarakatan. Dalam hal hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, maka sidang anak batal demi

³⁶Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, h. 140.

³⁷Angger Sigit Pramukti & Fuaddy Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 84.

hukum. Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk berserta orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan.

Persidangan perkara anak bersifat tertutup agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan, sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan.

Setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim berpendapat lain, laporan tersebut berisi tentang:

- a. Data pribadi anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial;
- b. Latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- c. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
- d. Hal lain yang dianggap perlu;
- e. Berita acara diversi, dan;
- f. Serta kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.

Pada dasarnya sidang anak dilanjutkan setelah anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh anak korban atau anak saksi pada saat anak berada diluar sidang pengadilan. Maka, sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Dalam hal tertentu anak korban diberikan kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Sehingga, hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian

kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, serta dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud diatas tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.

Pada proses pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi tetap harus dirahasiakan dari media massa dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Untuk itu, pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan, dan penuntut umum serta pengadilan wajib memberikan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum.

D. *Pemidanaan Bagi Anak Nakal*

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat sanksi pidana, baik pokok maupun tambahan yang dimuat dalam bab V tentang pidana dan tindakan dari pasal 69 dengan pasal 83.³⁸ Sebagaimana berikut yaitu:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat
 - 1) Pembinaan di luar lembaga,
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau

³⁸Angger Sigit Pramukti& Fuaddy Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 86-87.

3) Pengawasan

- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

2. Pidana Tambahan

- a. Perampasan keuntungan yang di peroleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Dalam hukum materiil diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Dalam hal ini pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 pasal 69 mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Sedangkan, anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.³⁹ Dengan demikian anak yang telah berusia diatas 14 tahun dapat dikenai pidana. Meskipun anak dikenai pidana dalam (pasal 81) ayat 2 yang berbunyi pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Dalam pasal 47 KUHP menyatakan bahwa:⁴⁰

³⁹Makarao & Muhammad Taufik, *Hukum Perlindungan Anak, dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Cet. I ; Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2013), h. 88.

⁴⁰Redaksi sinar grafika, *KUHP dan KUHP* (Cet. X V; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 21.

1. Jika hakim menjatuhkan pidana, maksimum pidana pokok terhadap tindakan pidanya dikurangi sepertiga.
2. Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maka dijatukan pidana penjara paling lama 15 tahun.
3. Pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan.

Pada pasal tersebut nampak adanya pengaturan khusus bagi anak yang melakukan suatu tindak pidana, dapat kita lihat sendiri jika orang dewasa yang dijatuhi pidana maka maksimum pidana pokok untuk orang dewasa dikurangi 1/3, dan begitu pula jika perbuatannya diancam pidana mati atau penjara seumur hidup maka hanya dijatuhi pidana paling lama 15 tahun.⁴¹ Berbeda halnya yang datur dalam pasal 10 KUHP pidana yang terdiri pada pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Dimana dalam pasal ini tidak ada perbedaan pidana antara orang dewasa maupun anak-anak.

Apabila ancaman hukuman yang disediakan terhadap anak menurut KUHP dibanding dengan ancaman hukuman anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengancam lebih ringan.

Pidana peringatan adalah pidana ringan yang mengakibatkan pembatasan kebebasan hak. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat, ditentukan mengenai syarat umum dan khusus. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani

⁴¹Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrument Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya* (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.165.

masa pidana dengan syarat. Sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama dari pada masa pidana dengan syarat umum. Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun, selama menjalani masa pidana dengan syarat, penuntut umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak dapat menempati persyaratan yang telah ditetapkan. Selama anak menjalani pidana dengan syarat, anak harus mengikuti wajib 9 (Sembilan) tahun.⁴²

Dalam hal hakim memutuskan bahwa anak dibina diluar lembaga, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya. Pidana diluar lembaga dapat berupa keharusan untuk: a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina; b. mengikuti tetapi dirumah sakit jiwa; atau c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliaannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak yang dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. Dan pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal ini anak dijatuhi pidana pengawasan, anak ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.⁴³

⁴²Makarao & Muhammad Taufik, *Hukum Perlindungan Anak, dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, h. 89.

⁴³Angger Sigit Pramukti & Fuaddy Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 88-89.

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.⁴⁴ Dalam pasal 80 ayat (4) menyebutkan bahwa anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 bulan berlakuan baik berhak mendapatkan pembebasan masyarakat.⁴⁵

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk pembahasan hukum yang pada prinsipnya senantiasa mengacu pada asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana. Sebelum lebih jauh membahas mengenai pengertian tindak pidana pembunuhan, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tentang tindak pidana dalam hukum pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Mengenai definisi tindak pidana dapat juga dilihat pendapat pakar-pakar, seperti Vos yang mengartikan bahwa delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh Undang-Undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Dan menurut Simons,

⁴⁴Makarao & Muhammad Taufik, *Hukum Perlindungan Anak, dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, h. 91.

⁴⁵Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 2012 (UU RI No. 11 Tahun 2012)*, h. 46.

delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/ tindakan yang dapat dihukum.⁴⁶

Secara umum yang dimaksud dengan tindak pembunuhan sebagaimana yang diatur dalam pasal 338 KUHP adalah barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.⁴⁷

Mencermati beberapa pemikiran diatas, penulis selanjutnya berkesimpulan bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan pembunuhan secara substansial adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia.

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam hukum islam pembunuhan dapat diklasifikasi atau dikelompokkan menjadi: *amd* (sengaja), *khata'* (tidak sengaja), dan *syibhui amd* (semi sengaja).

- a) Pembunuhan disengaja: yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk membunuh seseorang dengan menggunakan alat, yaitu benda atau situasi, yang dipandang layak untuk membunuh.⁴⁸ Pembunuhan sengaja sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qaadir Audah adalah pembunuhan sengaja adalah suatu

⁴⁶Ismu Gunadi & Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Cet.I ;Jakarta: Kencana, t. th), h. 37-38.

⁴⁷Redaksi sinar grafika, *KUHP dan KUHP* (Cet. X V; Jakarta: t.p., 2016), h. 115.

⁴⁸Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 24.

pembunuhan di mana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban.⁴⁹

Dari kedua definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan dia menghendaki akibat dari perbuatannya, yang matinya orang atau korban.

Pembunuhan sengaja dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah qishash dan kifarar, sedangkan penggantinya adalah diat dan ta'zir. Adapun hukuman tambahan adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat

b) Pembunuhan tidak sengaja (*khata*) sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Sabiq adalah: pembunuhan karena kesalahan adalah apabila seorang mukallaf melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan, seperti menembak binatang buruan atau membidik sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatannya dan membunuhnya.⁵⁰ Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan matinya orang lain. Pembunuhan tidak sengaja diancam beberapa macam hukuman diantaranya hukuman pokok diat dan kifarar, dan hukuman tambahan penghapusan hak waris dan wasiat.

c) Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Sebagai contoh: seorang guru

⁴⁹Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Cet. I ; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h.139.

⁵⁰Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, h.143.

memukulkan penggaris kepada kaki muridnya, dan tiba-tiba yang dipukul muridnya meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi sengaja (*syibhu al-amdi*). Hukuman untuk pembunuh semi sengaja ini diancam hukuman pokok dua macam yaitu, diat dan kifarar. Sedangkan hukuman pengganti yaitu ta'zir dan hukuman tambahan yaitu pencabutan hak waris dan wasiat.

Menurut ketentuan hukum Islam orang yang membunuh wajib diqishash sebagaimana firman Allah dalam:

a. QS al-baqarah/2: 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ لِمَعْرُوفٍ وَمِدَاءٍ إِلَيْهِ إِحْسَانٌ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.⁵¹

b. QS n-Nisa/4: 93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِرًا مُّعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ نَحْمُهُمْ خَالِدًا فِيهَا وَعُصِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)

Terjemahnya:

⁵¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 12. h. 33-34.

Dan barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, dia kekal didalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.⁵²

Maksud ayat ini yaitu akibat buruk dan sanksi ukhwari bagi pembunuh yang disengaja terhadap mukmin, yaitu barang siapa yang membunuh seseorang beriman dengan sengaja, maka balasannya yang wajar ialah neraka jahannam yang sangat mengerikan, kekal ia didalamnya, yakni berada disana dalam waktu yang sangat lama, bahkan bukan hanya berada ditempat yang sangat mengerikan itu tetapi ia juga disiksa dan Allah murka pula kepadanya dan mengutuknya, yakni tidak memberinya sedikit rahmat pun, serta menyediakan azab yang besar baginya.⁵³

Dari kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa sanksi pembunuhan harus *al-qī ā* ialah mengambil pembalasan yang sama, dan adapun kata maaf dengan ketetapan-Nya memberi wewenang kepada ahli waris untuk memilih memaafkan atau tetap memberi hukuman yang setimpal. Apabila ahli waris terbunuh memaafkan dengan menggugurkan sanksi *al-qī ā* maka digantikan dengan tebusan/ *al-diyat*. pada ayat kedua dapat dipahami bahwa seseorang dengan sengaja membunuh seorang mukmin maka balasannya adalah jahannam, dengan kata lain kejahatan yang cukup besar sehingga hukumannya pun harus setimpal dengan pelanggarannya, Selain itu tidak hanya mendapat sanksi dunia tetapi sanksi akhirat pun akan dirasakannya. Dengan adanya ketetapan ini semata- mata agar seseorang tidak seenaknya saja membunuh/ ada rasa jerah dan takut akan melakukan pembunuhan. Jika dalam pandangan Islam orang yang membunuh tanpa alasan yang dibenarkan, maka hukumannya juga dibunuh.

⁵²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h. 122.

⁵³M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Vol. 2 (Cet.1; Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 672.

Sementara dalam KUHP pasal 340 dijelaskan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.⁵⁴

Demikianlah ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an dan KUHP yang merupakan pedoman untuk menegakkan hukum dan hak-hak asasi manusia termasuk hak-hak anak, tergantung bagaimana pelaksanaannya.



⁵⁴ Redaksi sinar grafika , *KUHP dan KUHPA* , h. 116 .

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah, maka tidak lepas dari apa yang disebut dengan metode penelitian. “penelitian pada umumnya bertujuan menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan, mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada, masih atau menjadi diragukan kebenarannya”.

A. Jenis dan lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis empiris, yaitu mempelajari hukum dalam kenyataannya yang harus keluar dari batas-batas peraturan hukum dan mengamati praktik-praktik sebagaimana yang dilakukan orang-orang di dalam masyarakat.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Sunggumisa, karena pertimbangan bahwa lokasi penelitian tersebut relevan dengan masalah yang akan diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji suatu perundang-undangan yang tentunya yang terkait dalam pembahasan perlindungan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan dalam proses peradilan pidana anak.

2. Pendekatan Syari'i

Pendekatan Syari'i yaitu pendekatan dengan menggunakan ilmu Syari'ah terkhusus fiqih Islam yang terkait dengan masalah Jinayah yang termaksud didalamnya membahas mengenai anak sebagai pelaku pembunuhan.

3. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologis yaitu melakukan suatu analisa terhadap suatu keadaan masyarakat berdasarkan aturan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan anak sebagai pelaku pembunuhan.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan secara langsung pada lokasi penelitian yaitu pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa. Melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada informan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu beberapa hakim dan pegawai yang ada disekitar pengadilan tersebut. Sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai permasalahan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel, dokumen-dokumen dan peraturan lainnya yang membahas masalah ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang mencakup penjelasan tentang metode yang digunakan dalam pengumpulan data.⁵⁵ Adapun metode pengumpulan data yang digunakan secara umum yaitu *field research kualitatif*, sedangkan secara khusus dalam penelitian ini data diperoleh melalui, yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang akan diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview Guide* (panduan wawancara).⁵⁶

3. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder, yaitu berupa bahan hukum pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah bagian yang menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan

⁵⁵Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Laporan Penelitian* (Cet. 1; Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 17.

⁵⁶Moh Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 193.

dengan merujuk pada metodologi penelitian.⁵⁷ Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Peneliti sebagai instrumen pertama
2. Pedoman wawancara
3. Handphone/ camera untuk dokumentasi
4. Alat tulis

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Dalam teknik pengolahan data, data yang terkumpul belum memberikan apa-apa bagi tujuan penelitian ini, sebab data tersebut masih merupakan data mentah. Setelah data yang dibutuhkan telah berhasil dikumpulkan selanjutnya dilakukan beberapa hal, yaitu:

- a) Mengolah data;
- b) Memeriksa data,
- c) Klasifikasi data,

2. Analisis Data

Setelah pengolahan data , data disusun secara sistematis dan selanjutnya disajikan dalam bentuk analisa. Metode analisa itu sendiri adalah suatu metode yang dipakai penulis dalam menyusun skripsi in agar dalam penjelasannya kepada para pembaca dapa lebih mudah memahami skripsi ini. Adapun analisis data dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif.

⁵⁷Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian*, h. 17.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan dalam Proses Peradilan Pidana Anak Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada penelitian ini akan diuraikan salah satu kasus tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak dibawah umur berdasarkan *Putusan Nomor: 12.Pid.Sus. Anak /2015/ PN.Sgm.* Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan tersebut yaitu berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga penelitian ini akan menitik beratkan pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana anak merupakan segala upaya/ kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dalam proses peradilan yang dihadapinya agar psikologis anak tidak terganggu ketika dan telah mengikuti persidangan. Adapun perlindungan anak dalam proses peradilan pidana anak meliputi:

1. Hakim Pengadilan Anak

Hakim anak merupakan tokoh sentral dalam sistem peradilan pidana anak. Sehingga hakim anak sangat penting kedudukannya dalam proses peradilan anak karena hakim yang akan menetapkan putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Secara umum, syarat-syarat menjadi hakim anak yaitu Hakim yang telah bertugas sebagai Hakim minimal 15 (lima belas) tahun dan berumur 45 (empat puluh

lima) tahun keatas serta telah berkeluarga dan bersertifikasi berdasarkan Ketetapan Mahkamah Agung.⁵⁸

Pemeriksaan sidang anak pada dasarnya dilakukan dengan hakim tunggal dengan sidang tertutup (Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 56 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Hakim tunggal bertujuan agar sidang anak diselesaikan dengan cepat.

Pada *Putusan Nomor: 12.Pid.Sus. Anak /2015/ PN.Sgm* diadili oleh majelis hakim berdasarkan Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa atau dengan kata lain tidak menggunakan hakim tunggal. Pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam menetapkan bahwa perkara tersebut ditangani oleh majelis hakim yaitu dalam perkara tindak pidana tersebut memiliki sanksi hukuman penjara di atas tujuh tahun (Pasal 338 KUHP) dan pembuktiannya sulit maka diadili oleh majelis hakim dan dalam perkara tersebut menarik perhatian masyarakat.⁵⁹

Berdasarkan urain tersebut, pada dasarnya hakim dalam perlindungan anak yaitu hakim tunggal (jika sanksi hukumannya 5 tahun kebawah dan pembuktiannya mudah), tapi dalam perkara sanksi hukuman penjara di atas tujuh tahun (Pasal 338 KUHP) dan pembuktiannya sulit maka diadili oleh majelis hakim serta perkara tersebut menarik perhatian masyarakat.

⁵⁸Amiruddin Mahmud, *Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa*, wawancara pada tanggal 25 Desember, 2016. di pengadilan negeri sungguminasa.

⁵⁹Mochammad Djoenaidie, *Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa*, wawancara pada tanggal 21 Desember, 2016. di pengadilan negeri sungguminasa.

2. Persidangan Perkara Anak

Pada tahap persidangan, proses peradilan anak dilakukan dalam rangka melindungi hak-hak anak. Dalam pelaksanaan peradilan pidana anak di pengadilan Negeri Sungguminasa berikut tahapan yang dilakukan dalam proses persidangan berdasarkan pasal 52 UU Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:⁶⁰

- a. Ketua pengadilan wajib menetapkan terlebih dahulu hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah berkas perkara dari penuntut umum;
- b. Hakim mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim;
- c. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- d. Proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri;
- e. Dalam hal ini proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan;
- f. Dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ketahap persidangan.

Sebelum kasus anak dilimpahkan ke persidangan, terlebih dahulu yang dilakukan oleh para hakim Pengadilan Negeri Sunggumina yaitu melakukan diversi, setelah melakukan diversi dan tidak menemukan kesepakatan maka sidang dilanjutkan pada proses persidangan. Dalam halnya ketika melakukan diversi terhadap anak,

⁶⁰Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 2012 (UU RI No. 11 Tahun 2012)*, h. 31.

persidangan dilakukan tertutup untuk umum dan para hakim maupun pejabat lainnya tidak menggunakan baju kebesarannya, hal ini semata-mata agar proses penanganan anak terkesan secara kekeluargaan dan berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan tekanan terhadap anak.

Dalam persidangan. Hakim, penuntut umum dan penasehat hukum serta petugas lainnya tidak memakai toga atau pakaian (kebesaran) dinas. Prinsip dasar ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 22 UU Nomor.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun yang dimaksudkan agar dalam persidangan tidak menimbulkan kesan menakutkan atau menyeramkan terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar dengan pakaian biasa dapat mejadikan persidangan berjalan lancar dan penuh kekeluargaan.

Menurut Mochammad Djoenaidie Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sangat dianjurkan dalam pemeriksaan anak di pengadilan dinyatakan tertutup untuk umum karena pertimbangan psikologis anak. Dalam persidangan, hakim bertindak layaknya orang tua sendiri, bahkan hakim ditekankan tidak memakai toga dan baju kebesaran lainnya.⁶¹

Pemeriksaan anak dengan hakim tunggal pasal 44 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemeriksaan anak di tingkat pertama dengan hakim tunggal. Dalam hal ini perkara anak yang disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara-perkara pidana yang ancaman hukumnya dibawah tahun dan pembuktiannya mudah atau tidak sulit. Apabila tindak pidananya diancam dengan hukuman penjara diatas tujuh tahun dan pembuktiannya sulit, maka perkara anak diadili dengan hakim majelis (pasal 44 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012. Dengan hakim tunggal diharapkan baik langsung atau tidak langsung dapat lebih

⁶¹Mochammad Djoenaidie, *Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa*, wawancara penulis pada tanggal 21 Desember, 2016.

mempercepat proses penanganan perkara sehingga peradilan dapat dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sebagaimana dalam kasus anak Bohari alias Boha Bin H. Nuju diadili dengan majelis hakim, menurut bapak Amiruddin Mahmud salah satu hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa mengatakan bahwa pada dasarnya kasus anak dapat diadili oleh hakim tunggal maupun hakim majelis. Namun dalam penentuan hakim tunggal dan majelis hakim, ketika Hakim ketua memandang bahwa perkara tersebut bukan perkara biasa dan sulit pembuktiannya maka diadili oleh majelis hakim. Dilihat dari tolak ukur perbuatan pidana yang dilakukan oleh si anak.⁶² Adapun hakim anak di Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memiliki lebih dari satu hakim anak yang diangkat oleh Mahkamah Agung dan SK-nya berlaku secara kumulatif. Sehingga apabila kasus anak tidak dilakukan oleh hakim anak, maka keputusannya dinyatakan batal demi hukum. Dan dalam menjalani pemeriksaan di persidangan anak tetap dibantu laporan pembimbing anak dari masyarakat, bahkan keputusan dinyatakan batal demi hukum manakala tidak mendengar laporan pembimbing tersebut.

Laporan pembimbingan kemasyarakatan, Sebelum sidang dibuka hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian mengenai anak yang bersangkutan. Ini artinya pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan itu secara tertulis. Adapun dalam laporannya itu yang dimuat dalam pasal 57 (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah a) data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan social anak, b) latar belakang dilakukannya tindak pidana, c) keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa, d) hal lain yang dianggap perlu, e) berita acara diversi; dan, f)

⁶²Amiruddin Mahmud, *Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa*, wawancara penulis pada tanggal 25 Desember, 2016.

kesimpulan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan sebelum sidang dibuka adalah sebelum sidang secara resmi dibuka ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi cukup waktu bagi hakim untuk mempelajari laporan penelitian kemasyarakatan. Karena laporan tersebut tidak diberikan pada saat menjelang sidang melainkan beberapa waktu sebelumnya. Hakim wajib meminta penjelasan kepada pembimbing kemasyarakatan atas hal tertentu yang berhubungan dengan perkara anak untuk mendapatkan data yang lebih.

Pembukaan sidang, selanjutnya hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, kemudian terdakwa dipanggil dan memasuki ruang persidangan dengan didampingi orang tua, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pemasyarakatan. Menurut kebiasaan hakim kemudian memeriksa identitas terdakwa, dan setelah itu hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. setelah itu kepada terdakwa atau penasehat hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum jika ada.

Terdakwa didampingi Penuntut umum, penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua, wali/orang tua asuh untuk mendampingi anak di persidangan pasal 54 (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab terdakwa sendiri, tetapi karena hal ini terdakwa adalah anak, maka tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuh.

Pemeriksaan perkara, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa anak dibawah keluar ruang sidang, pada waktu pemeriksaan saksi tersebut, orang tua, wali atau orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang memengaruhi jiwa anak, karena tidak semua anak yang mempunyai sikap mental yang kuat untuk bisa mendengarkan secara langsung keterangan orang lain yang mengungkapkan perbuatannya yang kurang atau tidak baik. Bagi yang tidak bias mendengarkan dan ini tetap dipaksakan, akan berakibat tidak baik bagi perkembangan anak yang bersangkutan.

Mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi anak menurut ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberi kesempatan kepada orang tua,/wali dan/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, dengan alasan bahwa selama ini kurang memperhatikan anaknya, sehingga melakukan kenakalan.

Putusan, dalam mengambil keputusan hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, dan putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini dimaksudkan untuk mengedepankan sikap objektif dari suatu peradilan. Dengan sidang terbuka untuk umum, siapa saja dapat menghadiri sidang dan mengetahui seluruh isi putusan. Putusan yang tidak ducapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, adalah batal demi hukum.

Dalam perkara anak nakal, apabila perkaranya sudah di putus di Pengadilan Negeri, maka ada pihak yang (terdakwa atau penuntut umum) merasa tidak puas terhadap putusan itu, berhak mengajukan upaya hukum berupa banding ke Pengadilan Tinggi. Demikian pula, jika merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat banding, yang bersangkutan berhak untuk mengajukan ke Mahkamah Agung. Sehubungan dengan upaya tersebut yang dimuat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012.

3. Hak-Hak Anak dalam Proses Persidangan

Hak anak sebelum persidangan dalam kedudukan sebagai pelaku, sebagaimana yang dimukakan oleh Bapak Abdul Latief selaku panitra muda yaitu:

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja;
- c. Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat hukum dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan;
- d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan mengenai dirinya.

Hak anak selama persidangan dalam kedudukan sebagai pelaku, yaitu:

- a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
- b. Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat hukum selama persidangan;
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya;
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja;
- e. Hak untuk menyatakan pendapat;
- f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
- g. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya, dan;

h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

Hak anak selama persidangan dalam kedudukan sebagai pelaku, yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan dan menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja dan;
- c. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya atau keluarganya.⁶³

Pada tahap persidangan proses peradilan anak dilakukan dalam rangka melindungi hak-hak anak. adapun rangkaian yang biasa dilakukan oleh pengadilan Negeri Sungguminasa dalam proses persidangan anak adalah sebagai berikut:

- 1) Hakim wajib mengupayakan divesi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan (pasal 52 (2) UU No. 1 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak);
- 2) Hakim melakukan penahanan terhadap terdakwa tidak lebih 15 (lima belas hari);
- 3) Hakim melakukan perpanjangan penahanan terhadap terdakwa tidak lebih dari 30 hari;
- 4) Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai terdakwa(pasal 57 (1) UU No. 1 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak);
- 5) Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum (pasal 56 UU No. 1 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak);

⁶³Abdul Latief, *Wawancara Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa*, wawancara penulis pada Tanggal 27 Desember, 2016

- 6) Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua anak untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi anak sebelum menjatuhkan putusan (pasal 59 (1) UU No. 1 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak);
- 7) Hakim membacakan putusan dimana diucapkan terbuka untuk umum (pasal 61 UU No. 1 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak);
- 8) Hakim dalam pemeriksaan terhadap anak tidak memakai toga.⁶⁴

Berdasarkan hal tersebut meskipun kasus mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak di yuridiksi Pengadilan Negeri Sungguminasa terbilang masih jarang ditemukan kasus yang sampai pada tahap persidangan, akan tetapi tidak membuat para hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kesusahan dalam menangani kasus tersebut karena di Pengadilan Negeri Sungguminasa sendiri sudah mempunyai beberapa hakim khusus yaitu hakim anak. menurut hakim yang pernah menangani kasus ini bahwa aturan tentang pidana anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut dan sangat memperhatikan kondisi psikologis anak.

Pada kasus yang penulis dapat dengan Putusan *Nomor: 12.Pid.Sus. Anak /2015/ PN.Sgm*, hakim pengadilan negeri Sungguminasa memberikan putusan dengan pidana penjara selama 4 Tahun bagi terdakwa yang telah mengakui perbuatannya. Putusan hakim tersebut jauh lebih ringan dibanding dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum, dimana pada tuntutan jaksa tersebut menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan yang dilakukan terdakwa selama

⁶⁴Fifiyanti, *Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa*, wawancara penulis pada tanggal 21 Desember, 2016.

persidangan. Selain itu status sebagai anak di bawah umur membuat putusan tersebut jauh lebih ringan dibandingkan putusan pembunuhan pada umumnya.

Dalam mewujudkan kesejahteraan anak dalam perlindungan anak, telah menjadi prioritas penyelenggaraan sidang di Pengadilan Negeri Sungguminasa. dengan menciptakan suasana kekeluargaan dalam mengutamakan kesejahteraan anak di samping kesejahteraan masyarakat, meskipun kasusnya itu sangat jarang ditemukan, namun apabila ditemukan kasus tersebut maka hakim dihimbau untuk melaksanakan regulasi yang berlaku.⁶⁵

4. Sanksi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak.

a. Pidana

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa terhadap anak hanya dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan, (Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Pidana pokok terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat yaitu: a) pembinaan diluar lembaga; b) pelayananann masyarakat;atau c) pengawasan. Pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat (Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Jenis pidana baru dalam UU ini adalah pidana pemenuhan

⁶⁵Fifiyanti, *Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa*, wawancara penulis pada tanggal 21 Desember, 2016.

kewajiban adat yang maksudnya adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma atau adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum tersebut paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana orang dewasa. Apabila anak tersebut melakukan tindakan pidana mati atau seumur hidup maka pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Anak nakal tidak dapat dijatuhi pidana mati ataupun pidana penjara seumur hidup, walaupun melakukan kenakalan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup.

b. Tindakan

Sebagaimana dimuat dalam pasal 82 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- 1) Dikembalikan kepada orang tua/wali atau orangtua asuh;
- 2) Penyerahan kepada seseorang;
- 3) Perawatan di rumah sakit;
- 4) Perawatan di LPKS;
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan; oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi;
- 7) Dan/atau Perbaikan akibat tindak pidana.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa tindakan yang dijatuhkan kepada anak itu sendiri semata-mata untuk memulihkan seorang anak setelah berhadapan dengan hukum. Tindakan tersebut dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim. Meskipun anak itu dikembalikan kepada orang tua, wali atau

orang tua asuh, anak tersebut tetap dibawah pengawasan dan bimbingan kemasyarakatan, seperti mengikuti kegiatan pengajian dan lain-lain. apabila hakim berpendapat bahwa orang tua,wali atau orang tua asuh tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut di tempatkan di lembaga pemasyarakatan anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja. Latihan kerja ini dimaksud untuk memberikan keterampilan terhadap anak seperti pelatihan rias, pertanian dan sebagainya, sehingga setelah anak menjalani tindakan dapat hidup mandiri.Tindakan lain yang mungkin dijatuhkan Hakim kepada anak nakal adalah menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja untuk dididik dan dibina. Anak diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, harus memperhatikan agama anak yang bersangkutan.

Penjatuhan tindakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum apabila anak belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup, maka anak tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja ataupun dari salah satu yang dimuat dalam pasal 82 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum bertujuan untuk memberikan pelajaran agar kelak tidak mengulangi apa yang telah diperbuat, artinya ketika anak keluar dari masa-masa hukumnya dapat mejalani hidupnya dengan normal.

Analisis Penulis:

Pada Putusan *Nomor: 12.Pid.Sus. Anak /2015/ PN.Sgm*, hakim pengadilan negeri Sungguminasa memberikan putusan dengan pidana penjara selama 4 Tahun bagi terdakwa yang telah mengakui perbuatannya. Putusan hakim tersebut jauh lebih ringan dibanding dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum, dimana pada tuntutan jaksa tersebut menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan yang dilakukan terdakwa selama persidangan. Selain itu status sebagai anak di bawah umur membuat putusan tersebut jauh lebih ringan dibandingkan putusan pembunuhan pada umumnya. Namun, dalam penetapan hakim pada putusan ini adanya kekeliruan dengan diadilinya oleh majelis hakim berdasarkan Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa atau dengan kata lain tidak menggunakan hakim tunggal. Kekeliruan ini dapat dilihat dengan tuntutan jaksa 5 tahun dimana dalam hal ini apabila tuntutan jaksa dibawah tujuh tahun maka wajib diadili oleh hakim tunggal, berbeda ketika anak dituntut pidana 7 tahun maka barulah diadili oleh majelis hakim.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Dibawah Umur

Islam tidak hanya tunduk kepada prinsip esotetis mengenai tanggung jawab dan sanksi akhirat, tetapi juga menegaskan bahwa hal itu harus ditangani oleh hukum di dunia ini. Karena itu, Islam menentukan hukum *al-qī ā* untuk kejahatan pembunuhan, dan *al-diyat* dalam kasus pembunuhan disengaja.⁶⁶

Al-Qi ā atau *al-diyat* ini lebih dogmatid dan menjadi hak Allah yang tidak mungkin diubah atau dikurangi oleh manusia. Hukum Islam dalam tindak pidana pembunuhan yaitu jarimah *al-qī ā* atau *al-diyat* yang terdiri atas pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, dan pembunuhan semi sengaja.

Salah satu perkara pembunuhan yaitu berdasarkan *Putusan Nomor: 12.Pid.Sus. Anak /2015/ PN.Sgm.* dengan kronologis kejadian perkara bermula ketika terdakwa mendatangi korban Sudarman Binn Jumaruddin lalu menengur korban Sudarman Bin Jumaruddin dengan kata-kata “*janganko balap-balap dan gas-gas motormu karena banyak anak kecil*”, dan dikarenakan korban tersinggung dengan kata-kata terdakwa lalu korban Sudarman Bin Jumaruddin menjawab “*ah kenapai*”, sambil mengeluarkan badik miliknya disimpannya dibalik baju disamping pinggang sebelah kiri lalu pada saat korban Sudarman Bin Jumaruddin mengarahkan sebilah badiknya kearah terdakwa dan kemudian terdakwa menangkis tangan kanan korban Sudarman Bin Jumardin yang memegang sebilah badik, selanjutnya terdakwa juga mengeluarkan badiknya lalu menikam korban Sudarman Bin Jumaruddin dengan badik miliknya tersebut dengan mengenai bagian perut sebelah kiri, kemudian setelah korban Sudarman Bin Jumaruddin tertikam pada bagian perut kirinya selannjutnya

⁶⁶Ahmad Nur Fuad, Cekli Setya Pratiwi dan M. Saiful Aris, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, (Cet.1; Malang: t.p., 2010), h.76.

terdakwa menikam lagi korban Sudarman Bin Jumaruddin dan mengenai bagian pinggang sebelah kanan, lalu setelah korban Sudarman Bin Jumaruddin tertikan kedua kalinya oleh terdakwa maka langsung terjatuh ke tanah, kemudian setelah korban terjatuh ke tanah maka terdakwa mengambil badik korban Sudarman Bin Jumaruddin, setelah itu terdakwa meninggalkan tempat kejadian. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Sudarman Bin Jumaruddin meninggal dunia sebagaimana Surat Visum et Repertum No. 05/SK.VER/PKM/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, yang ditanda tangani oleh dr. HUDAYAH B.

Putusan Nomor: 12.Pid.Sus. Anak /2015/ PN.Sgm, dalam hal ini anak yang sebagai terdakwa bernama Bohari alias Boha Bin H. Nuju pada saat kejadian masih berumur 17 tahun/dibawah umur, sebagaimana foto copy kutipan akta kelahiran nomor 17743/IST/CS/2012, menerangkan bahwa di Bangkengnunu pada tanggal tujuh Maret tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh telah lahir atas nama terdakwa yaitu Bohari, yang dikeluarkan di sungguminasa pada tanggal empat belas November tahun dua ribu dua belas dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa Yaitu Drs. H. Bambang Suwandi, M.Si.

Berdasarkan kronologis perkara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pembunuhan sengaja dikarenakan ketika terdakwa melakukan penikaman ke korban Sudarman Bin Jumaruddin dengan badik (alat yang lazim digunakan membunuh) miliknya tersebut dengan mengenai bagian perut sebelah kiri, kemudian setelah korban Sudarman Bin Jumaruddin tertikam pada bagian perut kirinya selanjutnya terdakwa menikam lagi korban Sudarman Bin Jumaruddin dan mengenai bagian pinggang sebelah kanan

(situasi yang dianggap layak membunuh), lalu setelah korban Sudarman Bin Jumaruddin tertikam kedua kalinya oleh terdakwa maka langsung terjatuh ke tanah, sehingga dapat dipahami telah terjadi pembunuhan sengaja.

Dalam hukum Islam pembunuhan sengaja dikenakan *al-qi ā* dengan syarat-syarat yaitu: orang yang terbunuh dilindungi darahnya, orang yang membunuh telah baliq, orang yang membunuh berakal, pembunuhan dalam bebas memilih untuk membunuh atau tidak membunuh, pembunuhan bukan orang tua dari si terbunuh dan pembunuh dan terbunuh sederajat.⁶⁷

Adapun maksud dengan Orang yang dilindungi darahnya itu merupakan orang muslim, merujuk pada kasus dalam putusan tersebut si korban merupakan salah satu orang yang dilindungi darahnya karena korban merupakan bukan seorang kafir. Orang yang membunuh telah baliq maksudnya seseorang yang telah mencapai batas usia dikategorikan sebagai dewasa, dalam Islam itu sendiri batas usia anak dikatakan dewasa(baliq) adalah telah sampai umur 15 tahun seperti riwayat dari Ibnu Umar.⁶⁸

Dalam kasus ini terdakwa telah mencapai usia 17 tahun ketika melakukan tindak pidana pembunuhan, sehingga terdakwa dalam hal ini sudah masuk dalam kategori dewasa berdasarkan hukum Islam. Selain itu, terdakwa dan korban sama-sama berakal sehat serta terdakwa bukan ayah korban dan korban bukan anak terdakwa. Adapun unsur kesengajaan dalam kasus ini dapat dilihat dari alat yang digunakan lazim untuk membunuh dan situasi yang lazim ketika membunuh sebagaimana telah

⁶⁷Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam 1* (Cet.1; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.121-122.

⁶⁸Lunayahasna, *Batas Usia Anak dan Pertanggung jawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, sumber: <https://lunayahasna.wordpress.com/2012/07/30/batas-usia-anak-dan-pertanggungjawaban-pidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-hukum-pidana-islam-7/>. diakses pada tanggal 1 Mei 2017.

diuraikan sebelumnya. Dan dalam kasus ini terdakwa dan korban sederajat karena sama-sama muslim dan merdeka atau bukan budak. Sehingga terdakwa dapat dikenakan *al-qi ā* karena telah memenuhi syarat-syarat *al-qi ā* .

Berdasarkan hal tersebut maka terdakwa dikenakan *al-qi ā* dengan sanksi berupa hukuman yang setimpal atas apa yang di perbuatnya (hukuman mati), dan apabila keluarga si korban memaafkan perbuatan terdakwa maka dikenakan *al-diyat* berupa 30 *hiqqah* (unta betina umur 3 masuk 4 tahun), kemudian 30 *jadza'ah* (unta umur 4 masuk 5 tahun) dan 40 *khalifah* (unta yang sedang bunting).

Dalam QS al-Baqarrah/2:178. Allāh swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ
 فِي لَهُ مِنْ أُخِيهِ عَنَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
 شَيْءٌ قَاتِبًاغ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِ
 ()

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.⁶⁹

Maksud dari ayat tersebut bahwa *al-qi ā* ialah mengambil pembalasan yang sama. Pembalasan yang sama maksudnya yaitu apabila seseorang membunuh maka orang tersebut juga dibunuh atau apabila seseorang dianiayaan hingga gigi gerahamnya maka menghilangkan gigi geraham tersebut karena penganiayaan dilakukannya maka dihilangkan pula gigi gerahamnya dan lain sebagainya. Tetapi,

⁶⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 12.

jika keluarga terbunuh atau teraniaya ingin memaafkan dengan menggugurkan sanksi *al-Qi ā* maka digantikan dengan tebusan/ *al-diyat*.⁷⁰ Pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima *al-diyat*, Maka terhadapnya di dunia diambil *al-qi ā* dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.

Dalam QS Al-Ma'idah/5:32. Allāh swt. berfirman

جَمِيعًا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا النَّبِيُّ
()

Terjemahnya:

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.⁷¹

Ayat ini menegaskan bahwa kejahatan yang terjadi dan dampak-dampaknya yang sangat buruk itu, oleh karena perilaku Bani Isra'il yang telah dipaparkan sekian kali, maka kami yang maha agung menetapkan suatu hukum menyangkut satu persoalan yang besar dan hukum itu kami sampaikan atas Bani Isra'il bahwa: barang

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 1 (Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.393.

⁷¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h. 149-150.

siapa yang membunuh satu jiwa salah seorang putra- putri adam, bukan karena itu membunuh jiwa orang yang lain yang memang wajar sesuai hukum di bunuh, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, yang menurut hukum boleh di bunuh, seperti peperangan atau membela diri dari pembunuhan maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia misalnya dengan memaafkan pembunuh keluarganya atau meyelamatkan nyawa dengan seseorang dari suatu bencana, atau membela seseorang yang dapat terbunuh secara aniaya, maka seolah-olah dia telah meyelamatkan kehidupan manusia selamanya.

Ayat ini memberi perumpamaan bukannya penilaian pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan pembunuhan terhadap semua manusia, tetapi iya bertujuan untuk mencegah manusia melakukan pembunuhan secara aniya. Seorang yang melakukan pembunuhan secara aniaya pada hakikatnya memenangkan dorongan nafsu amarah dan keinginannya balas dendam atas dorongan kewajiban memelihara hak asasi manusia serta kewajiban mengekang dorongan nafsu ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam pandangan hukum Islam semua manusia apapun ras keturunan dan agamanya adalah sama dari segi kemanusiaan. Ini sekaligus membantah pandangan yang mengklaim keistimewaan satu ras atas ras yang lain baik dengan meperatas namakan agama sebagai anak anak dari kekasih Tuhan seperti orang orang yahudi maupun atas nama ilmu dan kekayaan seperti pandangan kelompok rasialis nazi dan semacannya.⁷² Dalam hal ini suatu penjiagaan agar seseorang tidak semena-mena melakukan pembunuhan yang dimana dalam alqisas itu sendiri ada pemeliharaan hidup. Pemeliharaan hidup ini dimaksudkan ketika seseorang ingin

⁷² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 1 (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 100-102.

melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membunuh maka dengan adanya hukuman alqisas yang telah diatur dalam hukum islam sehingga adanya upaya preventif yaitu pencegahan sebelum melakukan perbuatannya dengan kata lain seseorang itu akan takut melakukan pembunuhan karena adanya hukum yang mengatur tentang pemeliharaan hidup tersebut. Selain itu sesudah (reflektif) melakukan perbuatannya semuanya dalam rangka pemeliharaan.

Sebagaimana pula dalam hukum Islam dijelaskan bahwa seorang anak mempunyai banyak hak-hak yaitu berupa perlindungan dan semacamnya seperti yang terdapat dalam Qs Al-Kahfi/18: 46

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَرْغَبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَرْغُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ
هَآ قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْتَ
تَتَّخِذُ فِيهِمْ حُسْنًا ()

Terjemahnya

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebijakan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.⁷³

Pada penelitian ini berfokus pada perlindungan anak sebagai pelaku pembunuhan. Apabila terdakwa anak dibawah umur (belum mimpi basah, menstruasi, dan belum mencapai usis 15 tahun). maka tidak dapat dikenakan *al-qī ā* karena tidak memenuhi salah satu syarat dapat dikenakan *al-qī ā* yaitu telah balig. Selain itu anak masih belum cakap hukum atau kemampuan berfikir masih lemah.

Ras lullāh saw. bersabda:

⁷³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 408

شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا
 عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَا دِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَ
 لَنَائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَءَ
 حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari hammad dari Ibrahim dari Al Aswad Dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig.⁷⁴

Berdasarkan hadis tersebut terdapat kata “pena pencatat amal dan dosa telah diangkat dari tiga golongan” dari kalimat tersebut dapat dipahami bahwa ketiga atau salah satu golongan tersebut ketika melakukan dosa tidak di perhitungkan sebagai perbuatan dosa, misalnya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. sehingga anak tidak dapat dikenakan *al-qi ā* atau *diyat* karena tidak terhitung dalam perbuatan dosa (pidana)

Dalam hal ini apabila anak pelaku pembunuhan tidak dikenakan *al-qi ā* atau *al-diyat* ada baiknya dikenakan *al-ta'zir* yaitu hukuman yang bersifat mendidik. Dengan adanya *al-ta'zir* sebagai pengganti dari *al-qi ā* atau *al-diyat* akan mendidik anak untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, dan memahami atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang salah atau dosa.

Oleh karena itu ketika anak melakukan tindak pidana pembunuhan tidak dikenakan hukuman *al-qi ā* atau *al-diyat* karena salah satu syarat yang dapat

⁷⁴Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, nomor: 3822. Dalam Kitab 9 Imam (database online) (Lidwa Pusaka i-Software: t.t., t.th.) Diakses pada 06 Juni 2017, <http://localhost:5000/>.

dikenakan *al-qī ā* adalah orang balig atau hanya berlaku untuk orang dewasa saja dan tidak berlaku untuk anak-anak, karena anak-anak belum mempunyai akal dan pemikiran, masih labil dan masih bisa di arahkan ke jalan yang benar.

Namun dalam beberapa *ma hab*, hukuman *al-qī ā* dapat ditangguhkan pada anak di bawah umur, menurut sebagian ulama Hanafiyah, pelaksanaan hukuman lain berpendapat hukuman *al-qī ā* dilaksanakan oleh qadhi (hakim) yang mewakili mustahik tersebut. Menurut Malikiyah pelaksanaan hukuman *al-qī ā* tidak perlu menunggu anak tersebut dewasa, dan wali atau washiy diberi kekuasaan untuk melaksanakan *al-qī ā*, atau mengambil *al-diyat kamilah*. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, pelaksanaan hukuman *al-qī ā* harus menunggu anak tersebut dewasa. Alasannya adalah karena *al-qī ā* itu tujuannya untuk mengobati rasa duka, dan untuk menghilangkannya tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain, baik itu hakim atau wali.⁷⁵

Ma hab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman *al-qī ā* harus menunggu anak tersebut dewasa, sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman *al-qī ā* tidak perlu menunggu anak tersebut dewasa cukup dengan mengambil *al-diyat kamilah* dari walinya. Dengan demikian dari pendapat beberapa *Ma hab* tersebut, maka dalam hal ini pemerintah atau *l l amri* berhak menetapkan pendapat *Ma hab* mana yang diterapkan dalam kasus pembunuhan yang dilakukan anak di bawah umur atau tidak memilih sama sekali *Ma hab* tersebut. Apabila *l l amri* memandang hukuman *al-qī ā* lebih tepat, pelaku pembunuh dijatuhi hukuman *al-qī ā* tetapi apabila pemerintah memandang pemaafan dengan kompensasi harta lebih maslahat, pelaku

⁷⁵Ahmad Wardi Muschlih, *Hukum Pidana Islam* (Cet.1; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 158.

dimaafkan dan ia wajib membayar *al-diyat* atau menggantinya dengan *al-ta'zir* yaitu hukuman yang tidak ditentukan dalam nash yang dimana hukuman yang sifatnya mendidik dari pemerintah (penjara).

Berdasarkan uraian sub A dan B telah dijelaskan pembunuhan yang dilakukan oleh anak, dalam hukum positif tindak pidana pembunuhan sengaja diatur dalam pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun penjara, sedangkan dalam hukum Islam pembunuhan sengaja dikenakan hukuman *al-qīlā* atau *al-diyat* dengan membayar 100 ekor unta atau dengan *al-ta'zir* hukuman yang bersifat mendidik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana anak pelaku pembunuhan pada *Putusan Nomor: 12.Pid.Sus. Anak /2015/ PN.Sgm.* yaitu anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak, waktu sidang didahulukan dari waktu sidang orang dewasa, hakim tidak memakai toga/panitera tidak memakai jas (tidak menggunakan baju kebesaran), persidangan tertutup untuk umum dan beracara cepat, sanksi ½ dari sanksi orang dewasa, dan wajib diadili oleh hakim tunggal. namun dalam penetapan hakim pada kasus Bohari alias Boha Bin H. Nuju, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam kasus Bohari penuntut umum menuntut dengan pidana 5 Tahun penjara, tetapi dalam kasus tersebut diadidili oleh majelis hakim. Sebagaimana dimuat dalam pasal 44 (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak apabila ancaman pidananya di atas 7 maka perkara tersebut diadili oleh majelis hakim dan apabila ancaman pidananya tujuh 7 tahun ke bawah wajib diadili oleh hakim tunggal.
2. Dalam hukum Islam apabila seseorang melakukan pembunuhan, maka orang tersebut dapat dikenakan *al-qi ā* sebagai hukuman pokok, tetapi karena pelaku masih kategori anak yang mempunyai kemampuan berfikir lemah maka hukumannya dapat ditangguhkan sampai dia dewasa berdasarkan *Ma hab* syafi'iyah, Hanabilah dan Hanafiyah, sedangkan *Ma hab* malikiyah tidak perlu di *al-qi ā* tetapi cukup membayar *al-diyat* kamilah (membayar denda kepada

keluarga korban) oleh wali sebagai hukuman pengganti dari *al-qī ā* . Dalam hal ini pemerintah (hakim) berhak dalam menetapkan hukum dengan memilih salah satu dari beberapa *Ma hab* tersebut atau tidak sama sekali ataupun menggantinya dengan *al-ta'zir* sebagai pengganti dari *al-qī ā* , tetapi hukuman *al-ta'zir* tidak ditentukan dalam nash, sehingga dalam pemberian hukuman diserahkan pada hakim untuk menentukan sanksi hukuman. maka harus bersifat edukatif dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa.

B. Implikasi Penelitian

Berkenaan dengan penelitian tersebut, adapun implikasi penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan untuk para penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum yang paripurna sesuai dengan tujuan hukum acara peradilan pidana anak, sehingga hak-hak setiap warga Negara khususnya anak di bawah umur dapat terlindungi.
2. Sebaiknya dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak, hakim sebagai pembuat keputusan diharapkan lebih berhati-hati dalam menetapkan hakim tunggal dan majelis hakim untuk mengadili perkara anak dipersidangan serta memperhatikan setiap aturan yang telah ditetapkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Busthanul. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Dillah, Philis Dan Suratman. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Desasfuryanto, Adri dan Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTKI Jakarta, 2016.
- Effendi, Jonaedi & Isu Gunadi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Cet. I; Jakarta: Kencana, t. th.
- Fuad Ahmad Nur Fuad, Cekli Setya Pratiwi dan M. Saiful Aris, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet. 1; Malang, t.p, 2010.
- Hasan, Hamzah *Hukum Pidana Islam*. Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- I, Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Lubis, Chairuman Suhrawandi K. *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Cet. 1; Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Muschlih, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Cet. I ; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Munir, *Implementasi Hadis Pendidikan Shalat Terhadap Anak Pada Masyarakat Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar*. Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Primaharsya, Fuaddy & Angger Sigit Pramukti. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Cet. I ; Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- P, Jimmy Dan Zulkifli. *Kamus Hukum*. Surabaya: Grahamedia Press, 2012.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. Cet. 1; Yogyakarta: Laskbang Pressindo, 2016.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana*. Cet. II; Jakarta: Prenadamedia, 2016.

- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*. Cet. 27; Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 1. Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____. *Tafsir Al-Misbah* Vol. 2 Cet.1; Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- _____. *Tafsir Al-Misbah* Vol. 3 Cet.1; Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Setiawan, Marwan. *Karakteristik Kriminalitas Anak & Remaja*. Cet. I; Bandung: Ghalia Indonesia, 2015.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Soetodjo, Wagianto. *Hukum Pidana Anak*. Cet.II. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrument Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Taufik, Muhammad & Makarao. *Hukum Perlindungan Anak, dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Cet. I; Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2013.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian*. Makassar: Cet.1; Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Internet

- Lunayahasna, *Batas Usia Anak dan Pertanggung jawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*.
<https://wordpress.com/2012/07/30/batas-usia-anak-dan-pertanggungjawaban-pidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-hukum-pidana-islam-7/>.
 (Tanggal 1 Mei 2017 18:34:06 GMT).
- Daud, abu. *Sunan Abu Daud*, nomor: 3822. Dalam Kitab 9 Imam (database online) (Lidwa Pusaka i-Software: t.t., t.th.) <http://localhost:5000/>. (Tanggal 06 Juni 2017).
- Badan Pusat Statistik Perlindungan Anak Kabupaten Gowa, 2015. Sumber: <http://perlindungananak.com/data/anak-berhadapan-hukum-di-kab-gowa> (november 2016).

Peraturan Perundang-Undangan

- Hidayanti, Inur. *UUD 1945 dan Perubahannya+ Struktur Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Indonesia Tera, 2008.
- Kitab Undang- Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Redaksi Sinar Grafika. *KUHAP&KUHP*, (cet .XV; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 21.

_____. *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 2012 (UU RI No. 11 Tahun 2012)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Republika. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.



The logo of Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar is a light green emblem. It features a central shield-like shape with a pointed top, containing a smaller shield with the year '1965' in orange. The main shield is flanked by stylized, symmetrical elements that resemble open books or wings.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Multasyam Salmah, lahir di pinrang tanggal 07 April 1995 merupakan anak ke dua dari lima bersaudara, dari pasangan H. Abd. Salam dengan H.J. Mahadiah pendidikannya ditempuh mulai dari SDN 012 pada Tahun 2002 - 2007 kemudian melanjutkannya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada SMP Negeri 2 polewali pada tahun 2007- 2010, lalu kemudian melanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah atas pada SMA Negeri 1 Polewali pada tahun 2010, hingga pada tahun 2013 ia melanjutkan pada jenjang Strata satu (S1) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Fakultas Syariah Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, pada jenjang tersebut disamping aktifitas kuliah juga aktif pada organisasi ekstra dan intra, yakni sebagai wakil ketua bidang penelitian mahasiswa Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah & Hukum periode 2015 - 2016, Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang gowa, anggota organisasi daerah kerukunan keluarga pelajar mahasiswa batetangga (KKPMB).

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah bapak / ibu sering menangani kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak?
2. Apa aturan yang mengatur tentang tindak pidana dalam kasus ini?
3. Apakah yang menjadi kendala bapak/ ibu dalam menangani kasus ini ?
4. Bagaimanakah cara hakim dalam pengambilan putusan terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak?
5. Bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan dalam proses peradilan pidana anak?
6. Apakah bentuk-bentuk perlindungan hukum tersebut sebagaimana diatur dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah teralisasi sebagaimana mestinya?
7. Bagaimana peran peradilan dalam penerapan sanksi terhadap anak pelaku pembunuhan?

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Mochammad Djoenaidi, Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada tanggal 21 Desember, 2016. Di pengadilan negeri sungguminasa



Wawancara dengan Bapak Abdul Latif, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada tanggal 27 desember, 2016. Di pengadilan negeri sungguminasa



Foto bersama salah satu hakim pengadilan negeri sunguminasa sehabis penelitian yang dilakukan selama 1 bulan di pengadilan negeri sungguminasa



Wawancara dengan Bapak Amiruddin Mahmud, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada tanggal 25 desember, 2016. Di pengadilan negeri sungguminasa

1 21/16 JH 10 10/11/16

Tanggal 10 November 2016

Hal : Permohonan Judul Skripsi

Kepada Yth,

Ketua Jurusan/Program Studi

Ilmu Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Di

Samata-Gowa

buat skripsi no 3
di 26/11-2016

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Multasyam Salmah
NIM : 10300113189
Semester/Klpk : VII/D
Angkatan : 2013

Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut :

- ☒ Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian Dilakukan Oleh Anak (Putusan No.21/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Sgm)
- ☒ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor:11./Pid.Sus.Anak/2015/PN..Sgm) *mul sgm*
- ☒ 3. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan Dalam Proses Perdilan Pidana Anak (*sebuah analisis dengan metodologi hukum Islam*)
- ☒ Tinjauan Yuridis Kekerasan Fisik Dalam Keluarga Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor.../Pid.Sus/2015/PN Sgm. *mul sgm*)
- ☒ Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Polres Gowa) *mul sgm*
- ☒ Tinjauan Kriminologi Atas Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Thn 2013-2016 Kab.Gowa) *mul sgm*
- ☒ Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kab.Gowa Thn 2013-2016) *mul sgm*
- Kualitatif*

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor: 47HPK/2017

Judul Skripsi: Analisis Yuridis Terhadap Peradilan Pidana Anak Pelaku Pembunuhan di Pengadilan

Negeri Sungguminasa

Gowa, 22 Maret 2017

Penyusun,



Multasyam Salmah

Nim. 10300113189

Pembimbing I



Dr. M. Thahir Maloko., M. Hi
Nip.19631231 199503 1 006

Pembimbing II



Dr. H. M. Saleh Ridwan, M. Ag
Nip. 19640601 199303 1 003

Diketahui Oleh:

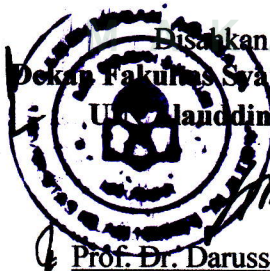
Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan



Dra. Nita Sastrawati, M. Si
Nip. 19710712 199703 2 002

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
Nip. 19621016 1990031 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 424835 Fax. 424836

Nomor : SI.1/PP.00.9/ 1426 /2017

Samata, 24 Maret 2017

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Kepada

Yth Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

Cq. Kepala UPT P2T BKPM D Prov. Sul-Sel.

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut dibawah ini :

Nama : Multasyam Salmah
Nim : 10300113189
Fakultas/jurusan : Syariah Dan Hukum / HPK
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BTN Ranggong Permai Blok A14/7 Antang Kassi (Makassar).

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya :

**ANALISI YURIDIS TERHADAP PERADILAN PIDAN ANAK PELAKU
PEMBUNUHAN DI PENGADILAN SUNGGUMINASA**

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. M. Thahir Maloko., M. Hi
2. Dr. H. M. Saleh Ridwan, M. Ag

Untuk maksud tersebut kami mengharap kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 29 Maret 2017 s/d 6 April 2017.

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak di ucapkan terima kasih.

Wassalam

Samata, 24 Maret 2017

An Rektor

Dekan Fakultas Syariah & Hukum



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag

NIP. 19621016 199003 1 003



PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

JALAN USMAN SALENGKE NO. 103 TELP. (0411) 861129-861089
SUNGGUMINASA - KABUPATEN GOWA 92111

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22.U3 / / HK / IV / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, menerangkan bahwa :

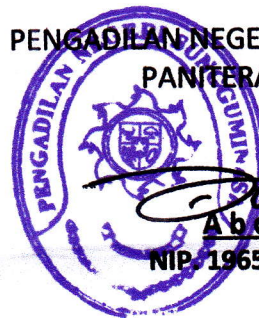
N a m a : Multasyam Salmah
Nomor Induk Mahasiswa : 10300113189
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/HPK
Jenis kelamin : Perempuan
Fakultas/Universitas : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
A l a m a t : BTN Ranggong Permai Blok A14/7 Antang Kassi Kota Makassar.

Telah melakukan Penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "**Analisis Yuridis Terhadap Peradilan Pidana Anak Pelaku Pembunuhan (Studi Putusan Nomor: 12.Pid.Sus. Anak /2015/ Pn.Sgm.)**

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada Peneliti tersebut diatas untu dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 04 April 2017.

PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA
PANITERA MUDA HUKUM



Abd. Latif, SH.
NIP. 19650920 199003 1 002

Tembusan :

- Arsip

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara MULTASYAM SALMAH NIM: 10300113189 Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama dan mengoreksi maka skripsi yang bersangkutan dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Peradilan Pidana Anak Pelku Pembunuhan di Pengadilan Negeri Sungguminasa” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan disetujui untuk diseminarkan di sidang hasil.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

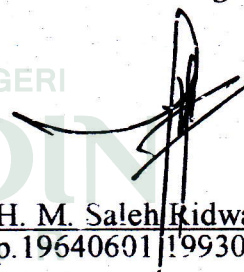
Gowa, 19 Juli 2017

Pembimbing I



Dr. Thahir/Maloko., M.Hi
Nip.19631231 199503 1 006

Pembimbing II



Dr. H. M. Saleh Ridwan., M.Ag
Nip.19640601 199303 1 003


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara MULTASYAM SALMAH, NIM: 10300113189, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "Analisis Yuridis Terhadap Peradilan Pidana Anak Pelaku Pembunuhan (*Studi Putusan Nomor: 12.Pid.Sus. Anak /2015/ PN.Sgm.*)" Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian Munaqasah (Akhir).

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 31 Juli 2017

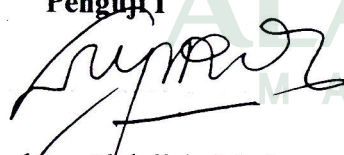
Pembimbing I


Dr. M. Thahir Maloko., M. Hi
Nip. 19631231 199503 1 006

Pembimbing II


Dr. H. M. Saleh Ridwan., M.Ag
Nip. 19640601 199303 1 003

Penguji I


Dr. Dudang Abdullah, M. Ag
NIP. 19540203 198503 1 002

Penguji II


Abd. Rahman Kanang, M. Pd., Ph. D
NIP. 19731231 200501 1 034